

Wakil Presiden Republik Indonesia Kirim Staf Khusus ke Metro Lampung, Ternyata Ini Tujuannya



Sumber gambar : <https://radarlampung.disway.id/read/675967/wakil-presiden-ri-kirim-staf-khusus-ke-metro-lampung-ternyata-ini-tujuannya>

RADARLAMPUNG.CO.ID - Wakil Presiden RI Maruf Amin mengirimkan staf khususnya, Gatot Prio Utomo ke Kota Metro Lampung, Senin 21 Agustus 2023.

Di Kota Metro Gatot Prio Utomo rupanya langsung menyambangi Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Metro Lampung.

Peninjauan itu dimaksudkan untuk memantau perkembangan penggunaan dan penerapan MPP berbasis digital di Bumi Sai Wawai.

Gatot Prio Utomo mengatakan, di awal pengaplikasian MPP digital ada 20 kabupaten kota yang menerapkan MPP berbasis digital.

Di mana, salah satu kota yang menerapkannya adalah Kota Metro yang ada di Provinsi Lampung. Kota Metro jadi salah satu pilot project percontohan nasional dari 21 Mal Pelayanan Publik digital di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

"Iya, untuk MPP digital ini kan masih fase awal. Ada 20 kabupaten dan kota, yang salah satunya Metro. Jadi kami ingin lihat seperti apa progresnya di sini," ujarnya.

Dia menuturkan, di awal penerapan MPP digital baru ada delapan layanan terkait dengan Dukcapil dan akan terus bertambah, serta perizinan layanan kesehatan.

"Untuk di fase awal ini, baru ada dua pelayanan, kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. Jika nanti sudah berjalan baik di 20 kabupaten ini, akan kita terapkan ke seluruh daerah," tukasnya.

Dikatakan Gatot, adanya penerapan MPP digital ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, pelayanan digital ini dapat membuat waktu lebih efektif, dan proses perizinan lebih cepat.

"Di MPP yang biasa kan, masyarakat masih harus ke sana ke sini. Tapi kalau di MPP digital ini lebih mudah. Jangkauan pelayanan MPP digital ini juga akan lebih luas," tambahnya.

Tetapi, lanjutnya, untuk MPP digital ini juga, harus sangat diperhatikan penggunaannya. Dibutuhkan kehati-hatian, sebab MPP digital ini akan terintegrasi dan menyimpan semua data masyarakat.

"Karena MPP digital ini akan menyimpan data seluruh masyarakat. Ya jadi harus hati-hati," tukasnya.

Menurutnya, migrasi ke MPP digital juga harus didukung dan didorong oleh pemerintah daerah.

Dikarenakan, MPP digital ini membutuhkan fasilitas sarana prasarana yang memadai.

Ia menyampaikan, fasilitas MPP saat ini di Kota Metro sudah cukup baik, pelayanan yang bagus, dan gedung pelayanan yang baik juga.

"MPP baru ada setengah tahun, tapi pelayanannya sudah luar biasa. Gedungnya bagus, pelayanan ya juga prima, dan pengaturan antrean pun sudah bagus. Jadi ya ini tinggal menyosialisasikan saja fasilitasnya. Sehingga masyarakat tertarik ke sini dan mendapatkan pelayannya yang prima," kata dia.

Pihaknya berharap, semua layanan government citizen itu pun bisa dilayani dari MPP digital. "Seperti pembuatan sim, paspor dari satu aplikasi. Sehingga masyarakat ini tidak perlu kemana-mana dan akan membangun kemudahan," tandasnya.(*)

Sumber berita:

Radar Lampung, <https://radarlampung.disway.id/read/675967/wakil-presiden-ri-kirim-staf-khusus-ke-metro-lampung-ternyata-ini-tujuannya>, Wakil Presiden RI Kirim Staf Khusus ke Metro Lampung, Ternyata Ini Tujuannya, 22 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengatur mengenai penerapan Mal Pelayanan Publik Digital pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2021, terdapat 56 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
2. Pembangunan MPP dan MPP Digital Services. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
3. Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel pada S.5 diatur sebagai berikut:
 - a. Sasaran (*immediate outcome*) : Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)

- b. Indikator : Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital
 - c. Target : 100 % pada tahun 2024
 - d. Output Utama :
 1. Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital;
 2. Tersedianya MPP digital; dan
 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital
4. Kamus Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I pada nomor 7, yaitu : Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital.
- a. Definisi Operasional : Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi MPP digital oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan MPP Digital pada pemerintah daerah.
 - b. Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik
 - c. Sumber data: Laporan hasil Monev